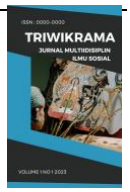
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Collaborative Governance Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Surabaya Studi Pada UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya (Rumah Ilmu Arek Suroboyo)

Sherli Deffia Meylta Aulia[1], Adi Soesiantoro[2], Ghulam Maulana Ilman[3]

[123] Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

sherlituban@gmail.com
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id
ghulamilman@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Fenomena anak jalanan di Kota Surabaya mencerminkan masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi meskipun kota ini berkembang sebagai pusat metropolitan di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam penanganan anak jalanan di Kota Surabaya dengan fokus pada peran UPTD Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana. Penelitian ini menggunakan model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Sosial, RIAS, sektor swasta, dan masyarakat telah berjalan cukup efektif melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen jangka panjang, dan pemahaman bersama tentang pemberdayaan anak jalanan. Program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang didukung CSR mampu menghasilkan perubahan perilaku positif bagi anak binaan. Namun demikian, kolaborasi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, partisipasi swasta dan masyarakat yang belum konsisten, mekanisme koordinasi dan evaluasi yang belum baku, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kepemimpinan Dinas Sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi melalui pencatatan rapat yang lebih sistematis, penambahan serta peningkatan kompetensi pendamping, dan penyusunan MoU antaraktor agar pelaksanaan program penanganan anak jalanan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci*:* Tata Kelola Kolaboratif; Penanganan; Anak Jalanan; Kota Surabaya

A B S T R A C T

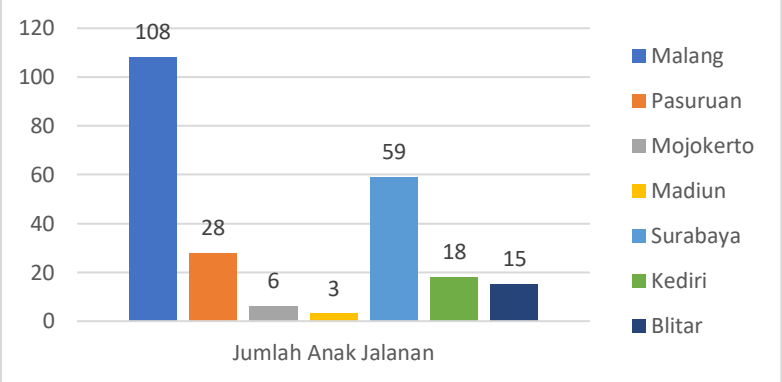
The phenomenon of street children in Surabaya reflects the persistence of social and economic disparities despite the city's development as a metropolitan center in East Java. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in managing street children in Surabaya, with a specific focus on the role of UPTD Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) under the Surabaya City Social Service. The research employs a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The study adopts the collaborative governance model proposed by Ansell and Gash, which includes starting conditions, the collaboration process, institutional design, and facilitative leadership. The findings indicate that collaboration among the Social Service, RIAS, the private sector, and the community has been fairly effective through

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

face-to-face dialogue, trust building, long-term commitment, and shared understanding regarding the empowerment of street children. Programs on guidance, education, and skills training supported by CSR initiatives have contributed to positive behavioral changes among the assisted children. However, several challenges remain, including limited human resources and budget, inconsistent participation from the private sector and the community, the absence of standardized coordination and evaluation mechanisms, and high dependence on the leadership of the Social Service. This study recommends strengthening collaboration through more systematic meeting documentation, increasing the number and competence of facilitators, and establishing formal MoUs among actors to ensure that program implementation becomes more structured, transparent, and accountable.
***Keywords**: Collaborative Governance; Handling; Street Children; Surabaya City*

1. PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan di Indonesia adalah isu sosial yang sangat rumit dan telah ada sejak lama, mencerminkan kesenjangan pembangunan serta kurangnya akses terhadap hak-hak dasar anak. Data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menyatakan bahwa jumlah anak jalanan sejak tahun 2017 berjumlah 36.000 jiwa dan terus bertambah hingga 232.894 jiwa pada tahun 2022 (Alfinda Adelia Dirli et al., 2025). Anak jalanan biasanya terlihat di kota-kota besar, di mana mereka sering melakukan aktivitas seperti mengamen, meminta-minta, berjualan barang kecil, atau bahkan menjadi korban eksploitasi oleh beberapa pihak (Muhammad, 2021). Keberadaan mereka di tempat umum mencerminkan adanya masalah serius dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak. Penyebab utama yang menjadikan anak-anak menjadi pengemis jalanan adalah kemiskinan, ketidakharmonisan dalam keluarga, perpindahan ke kota, serta kurangnya jaminan sosial yang memadai. Situasi ini tidak hanya berpengaruh pada perkembangan anak, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih besar bagi lingkungan di sekitarnya. Sebenarnya, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai regulasi nasional (Faiz Asmi Permana & Septi Nur Wijayanti, 2022). Oleh karena itu, anak jalanan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara hadir dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.



Gambar 1. 1 Jumlah Anak Jalanan di Beberapa Kota di Jawa Timur

Sumber: Olahan Peneliti, dari (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019)

Dapat dilihat pada gambar 1.1, menurut data Badan Pusat Statistik, Kota Malang menduduki peringkat pertama dengan jumlah anak jalanan terbanyak yaitu 108 anak. Selanjutnya disusul oleh Kota Surabaya dengan jumlah 59 anak jalanan. Di posisi berikutnya terdapat Kota Pasuruan dengan 28 anak jalanan, kemudian Kota Kediri sebanyak 18 anak. Sementara itu, Kota Blitar tercatat memiliki 15 anak jalanan, Kota Mojokerto 6 anak, dan yang paling sedikit adalah Kota Madiun dengan 3 anak jalanan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019).

Alasan penelitian mengenai anak jalanan dilakukan di Kota Surabaya bukan di Kota Malang meskipun jumlah anak jalanan di Malang lebih banyak yaitu karena Surabaya memiliki

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

kompleksitas yang lebih tinggi sebagai kota metropolitan sekaligus pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di Jawa Timur (Tio Ferdian Rahmana, 2024). Surabaya berpotensi sebagai tempat persinggahan dan pemukiman bagi kaum pendatang (imigran). Hal itulah yang menjadikan Surabaya sebagai kota multi etnis yang ragam akan budaya. Mereka berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk menetap dan mengadu nasib dari berbagai penjuru nusantara mulai dari Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Papua. Selain itu, terdapat etnis-etnis yang berasal dari luar Indonesia seperti China, Arab, Melayu, India, Eropa, Afrika, dan Amerika, mereka datang dan singgah bahkan menetap hidup berdampingan dan membaur dengan penduduk asli Kota Surabaya (Amris, 2024). Banyaknya pendatang dari berbagai daerah, suku dan etnis membuat kota Surabaya menjadi semakin padat penduduk serta membuat persaingan hidup semakin berat, meskipun banyak perusahaan dan instansi terkemuka baik milik negara maupun swasta tidak mampu menampung semua penduduk yang ingin bekerja di kota Surabaya. Biasanya mereka yang tidak mampu bersaing dengan ketatnya persaingan bertahan hidup di Surabaya memilih untuk mengais rejeki di jalanan tak terkecuali anak-anak. Banyak anak-anak yang hingga kini masih hidup di jalanan untuk mencari rezeki demi kelangsungan hidup mereka.

Kota Surabaya menghadapi berbagai permasalahan sosial, termasuk fenomena anak jalanan. Anak jalanan di Surabaya tersebar di berbagai titik strategis seperti perempatan jalan, pusat perbelanjaan, stasiun, dan terminal (Febriana Rohmatin, 2025). Mereka biasanya bekerja sebagai pengamen, pengemis, pemulung, atau pekerja informal lainnya demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Keberadaan anak jalanan ini mencerminkan masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di kota yang dikenal maju ini. Meskipun Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, kesenjangan sosial masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Banyak keluarga miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga anak-anak mereka terpaksa turun ke jalan untuk mencari nafkah (Rara Wa Ode, 2025). Faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak-anak ini tidak dapat menikmati kehidupan yang layak dan pendidikan yang memadai. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus jika tidak ada intervensi yang efektif dari pemerintah dan masyarakat.



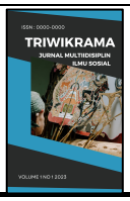
Gambar 1. 2 Jumlah Anak Jalanan di Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Sumber: Olahan Peneliti, dari (Akira Tandika Paramitaningtyas, 2024)

Anak jalanan di Surabaya berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun mayoritas dari mereka berasal dari keluarga miskin dan kurang harmonis (Andi Aysha Zalika Ardita Putri, 2022). Beberapa anak berasal dari keluarga yang mengalami perceraian, kekerasan dalam

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



rumah tangga, atau kehilangan salah satu orang tua. Akibatnya, mereka merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup, sehingga memilih untuk mencari kebebasan di jalanan. Jalanan menjadi tempat bagi mereka untuk bertahan hidup, meskipun penuh dengan berbagai risiko dan bahaya.

Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan bahwa angka anak jalanan di Kota Surabaya terus mengalami penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Berdasarkan pada gambar 1.2, meskipun jumlah anak jalanan sempat menurun pada tahun 2023, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa permasalahan ini masih belum terselesaikan sepenuhnya dan memerlukan perhatian khusus serta penanganan serius dari berbagai pihak terkait (Akira Tandika Paramitaningtyas, 2024).

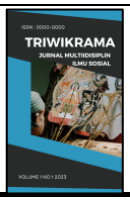
Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk meminimalisir dan mengatasi masalah anak jalanan (Mohammad Iqbal Syahriar, 2023). Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi karena mereka adalah aset penting dalam pembangunan suatu negara (Farhani et al., 2024). Masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas anak-anak yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, memberikan perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat bagi anak merupakan tanggung jawab bersama. Dengan memastikan hak-hak dan kebutuhan hidup anak terpenuhi, sebuah negara dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Selain itu, penanganan anak jalanan juga diperlukan untuk mencegah munculnya berbagai dampak sosial negatif di masyarakat. Anak jalanan yang tidak terarah berisiko besar terjerumus pada perilaku menyimpang seperti tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, dan keterlibatan dalam lingkaran kemiskinan (M. Sofi Al Umam, 2022). Hal ini akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih kompleks dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Upaya penanganan anak jalanan ini juga mendukung visi Kota Surabaya sebagai kota yang layak huni dan ramah anak (Andhi Dwi Setyawan, 2024). Keberadaan anak jalanan yang tidak tertangani dengan baik akan berpengaruh pada citra kota, baik di mata warganya sendiri maupun di mata masyarakat luar. Sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur, Surabaya perlu menjaga citra sebagai kota yang manusiawi dan peduli terhadap seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dan berkeadilan sosial.

Walaupun sudah banyak orang yang melakukan penelitian mengenai anak jalanan, namun penelitian ini tetap penting untuk dilakukan. Salah satu kebaruan dalam penelitian ini adalah adanya program-program baru yang digagas oleh walikota baru Surabaya dalam menangani anak jalanan. Misalnya, melalui sekolah dan masuk asrama Kanri atau RIAS (Pemerintah Kota Surabaya, 2025). Program ini menunjukkan adanya inovasi yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya yang lebih fokus pada penertiban. Selain itu, pemerintah kota juga memperkuat kerja sama dengan dunia usaha melalui CSR untuk mendukung pembiayaan program anak jalanan. Hal ini menandakan adanya pergeseran dari pendekatan pemerintah-sentris menjadi lebih kolaboratif. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana inovasi tersebut efektif dalam mengurangi jumlah anak jalanan. Kebaruan inilah yang menjadi nilai tambah penelitian ini.

Penelitian ini juga menjadi penting karena melibatkan analisis terhadap aktor-aktor baru yang kini terlibat dalam penanganan anak jalanan. Misalnya, keterlibatan perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan nonformal bagi anak jalanan, atau peran komunitas kreatif yang membantu anak jalanan mengembangkan bakat seni. Kehadiran aktor-aktor baru ini membuka dinamika baru dalam tata kelola penanganan anak jalanan di Surabaya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran pemerintah dan LSM, maka penelitian ini menekankan pentingnya

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



jejaring aktor yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kolaborasi multiaktor memengaruhi efektivitas program. Hal ini merupakan kontribusi baru yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan nilai kebaruan yang kuat.

Berdasarkan permasalahan sosial yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "***Collaborative Governance* Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Surabaya Studi Pada UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya (Rumah Ilmu Arek Surabaya)**". *Collaborative Governance* bukan hanya sekadar konsep, tetapi solusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti anak jalanan di Kota Surabaya. Dengan mengedepankan kerja sama dan kolaborasi antar aktor, permasalahan sosial yang kompleks ini dapat ditangani secara komprehensif. Melalui *collaborative governance*, berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan lembaga non pemerintah dapat berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk menangani permasalahan anak jalanan di Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

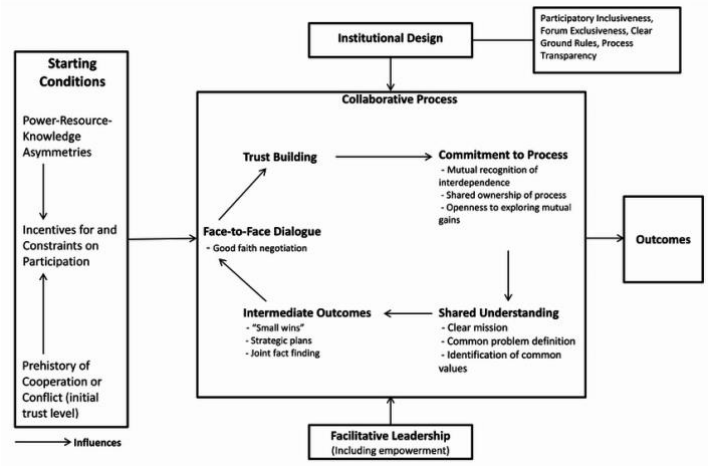
Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan "*non-state*" di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset. Balogh dkk mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak. Sedangkan Robertson dan Choi (2010), mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Jadi, *collaborative governance* adalah suatu proses pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang bersifat inklusif, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus, di mana setiap aktor memiliki peran dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mencapai solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan publik yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh satu pihak saja.

Salah satu model *collaborative governance* yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian adalah model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Model ini menekankan pentingnya interaksi langsung antar pemangku kepentingan melalui proses dialog yang konstruktif, pembentukan kepercayaan, saling memahami kepentingan, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008) dapat digambarkan sebagai berikut.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



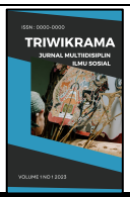
Gambar 2. 1 Model *Collaborative Governance* Menurut Ansell dan Gash (2008)

Sumber: Ansell dan Gash (2008)

Dalam jurnal *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Ansell dan Gash (2008) merumuskan model *collaborative governace* berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam empat variabel utama yang terdiri dari: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan fasilitatif; dan (4) proses kolaboratif (Astuti et al., 2020).

1. Kondisi Awal: Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan, sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya, ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan, dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.
2. Desain Kelembagaan: Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main apabila ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.
3. Kepemimpinan Fasilitatif: Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpatisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemagku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi.
4. Proses Kolaboratif: Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Berikut ini merupakan kelima proses kolaboratif dan dapat dimulai dari mana saja.
    a. Dialog Tatap Muka: Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/kesepakan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan "saling menguntungkan" para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.
    b. Membangun Kepercayaan: Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog, para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan.
    c. Komitmen Dalam Proses Kolaborasi: Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman Bersama: Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.
e. Hasil Sementara (Pertengahan): Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil sementara (pertengahan) dari proses kolaborasi.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan anak jalanan bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan anak jalanan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Penelitian ini menggunakan indikator *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) untuk memahami peran antar pemangku kepentingan dalam penanganan anak jalanan yang meliputi, kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*). Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menetapkan lokasi di Kota Surabaya dengan situs penelitian di Rumah Ilmu Arek Suroboyo sebagai bagian dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan bahwa Rumah Ilu Arek Suroboyo merupakan UPTD dari Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak jalanan yang ada di wilayah Surabaya. Sumber data penelitian yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informasi langsung dari responden di lapangan, mencakup informasi yang diungkapkan oleh narasumber serta data yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen dan media massa, yang meliputi berita surat kabar, artikel, buku, jurnal, skripsi dan referensi panduan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion verifying/drawing*).

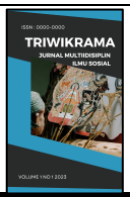
Tabel 2. 1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	S. K.	Staf Dinas Sosial Kota Surabaya
2.	V. Y.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS)
3.	P. A	Staf Fave Hotel Surabaya
4.	A.	Masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penanganan anak jalanan di Kota Surabaya, peneliti menerapkan teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat komponen utama yaitu kondisi awal (*starting conditions*), proses kolaborasi (*collaborative process*), desain kelembagaan (*institutional design*), dan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*). Model ini digunakan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi antaraktor, yang melibatkan Dinas Sosial, Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS), sektor swasta, dan masyarakat, terbentuk, dijalankan, serta berkontribusi terhadap keberhasilan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya.

Keempat komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk dinamika kolaborasi yang efektif. *Starting conditions* menggambarkan kondisi awal dan latar belakang yang menjadi dasar terbentuknya kolaborasi; *collaborative process* menjelaskan interaksi antaraktor melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama; *institutional design* menyoroti mekanisme kelembagaan yang mengatur peran serta tanggung jawab antar pihak; sedangkan *facilitative leadership* berfokus pada peran kepemimpinan dalam mengoordinasikan seluruh aktor agar kolaborasi berjalan seimbang dan berkelanjutan.

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

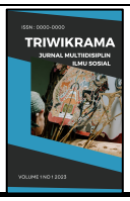
Menurut Ansell dan Gash (2007), kondisi awal menggambarkan situasi dan latar belakang yang menjadi dasar terbentuknya kolaborasi. Kondisi awal kolaborasi menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah anak jalanan di Surabaya menjadi faktor utama pendorong lahirnya kerja sama lintas aktor. Situasi ini semakin dipersulit oleh kesenjangan ekonomi yang mendorong anak-anak turun ke jalan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan wawancara, Dinas Sosial memahami bahwa pendekatan penertiban saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas masalah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi yang melibatkan pemerintah, lembaga sosial, sektor swasta, dan masyarakat. Tekanan sosial yang semakin meningkat inilah yang menjadi fondasi lahirnya praktik kolaboratif di Kota Surabaya.

Selain faktor meningkatnya jumlah anak jalanan, keterbatasan sumber daya pemerintah juga menjadi *starting condition* penting. Pemerintah menyadari bahwa fasilitas, tenaga pendidik, dan anggaran yang tersedia tidak mampu mencakup seluruh kebutuhan pembinaan anak jalanan secara mandiri. Kondisi ini mendorong Dinas Sosial membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga teknis seperti RIAS yang berfungsi sebagai pusat pembinaan. Keterbatasan ini kemudian direspons dengan membangun jaringan aktor yang lebih luas untuk memperkuat kapasitas program. Dengan demikian, faktor internal dan eksternal menjadi dasar terbentuknya kolaborasi lintas sektor.

Pihak swasta juga berperan penting dalam tahap awal kolaborasi karena adanya kesadaran bersama akan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Beberapa perusahaan seperti Fave Hotel tergerak untuk terlibat karena melihat potensi anak-anak binaan dalam bidang keterampilan. Mereka memandang bahwa partisipasi tersebut tidak hanya memberikan nilai sosial, tetapi juga menciptakan hubungan positif dengan masyarakat. Keterlibatan awal pihak swasta menunjukkan bahwa kolaborasi ini dibangun atas dasar kesadaran kolektif, bukan semata-mata kewajiban formal. Inisiatif ini sekaligus memperkaya kualitas kolaborasi sejak tahap awal.

Di sisi lain, masyarakat turut menjadi aktor penting dalam *starting conditions* karena mereka merasakan langsung dampak dari meningkatnya jumlah anak jalanan. Masyarakat di sekitar lokasi RIAS awalnya meragukan efektivitas program pemerintah, namun perubahan perilaku anak-anak setelah mengikuti pembinaan membuat mereka mulai

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



mendukung. Dukungan masyarakat tumbuh melalui interaksi langsung dan hasil nyata yang terlihat di lingkungan. Perubahan persepsi ini menjadi modal sosial yang memperkuat fondasi kolaborasi. Penelitian Yuliana (2023) yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Mengatasi Kemiskinan Menuju SDG's 2030 di Kota Makassar", yang menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan para aktor sejak tahap awal, termasuk kesadaran bersama akan urgensi masalah, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta dorongan masyarakat dan pihak swasta untuk berperan aktif. Dengan demikian, kondisi awal kolaborasi ditandai oleh kebutuhan bersama untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih positif.

2. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Proses kolaborasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Surabaya mencakup serangkaian aktivitas interaktif yang melibatkan berbagai aktor. Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa proses kolaboratif terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes*. Kelima elemen tersebut menggambarkan dinamika interaksi dan koordinasi antar-pihak yang menentukan keberhasilan kolaborasi. Dalam konteks penanganan anak jalanan di Kota Surabaya, Dinas Sosial dan Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) bersama lembaga mitra seperti sektor swasta serta masyarakat terlibat aktif dalam membangun komunikasi dan sinergi lintas sektor. Proses ini menjadi ruang untuk saling memahami peran dan memperkuat kerja sama dalam menangani anak jalanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pencapaian hasil sosial yang nyata.

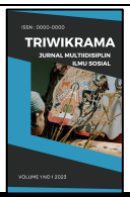
a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Dialog tatap muka menjadi langkah awal dalam membangun pemahaman bersama antaraktor. Dialog tatap muka menjadi salah satu pilar utama dalam collaborative governance karena memungkinkan aktor-aktor yang terlibat untuk membangun kesepahaman secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial secara konsisten mengadakan rapat koordinasi atau diskusi dengan RIAS, sektor swasta, dan masyarakat sebagai sarana evaluasi dan sinkronisasi program. Pertemuan rutin ini menjadi forum terbuka untuk menyampaikan aspirasi, hambatan, dan kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi langsung membantu meminimalkan kesalahpahaman dan mencegah tumpang tindih program.

Temuan juga menunjukkan bahwa RIAS memanfaatkan dialog tatap muka untuk menjelaskan kondisi faktual anak-anak binaan kepada mitra eksternal. Interaksi langsung membuat pihak swasta memahami bahwa pembinaan anak jalanan tidak hanya terbatas pada pemberian fasilitas, tetapi juga membutuhkan pendekatan psikologis dan edukatif. Melalui diskusi ini, pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil anak-anak. Dengan demikian, intensitas komunikasi yang tinggi membantu meningkatkan efektivitas dukungan yang diberikan para mitra.

Sektor swasta, terutama Fave Hotel, terlihat aktif dalam proses dialog sebelum melaksanakan kegiatan sosial seperti pelatihan *cooking class*. Pertemuan tersebut berfungsi untuk memastikan materi pelatihan relevan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Kolaborasi berbasis dialog ini menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka mendorong komitmen aktor untuk memberikan kontribusi

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



yang tepat guna. Hal ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu oleh Adinda Khairinnisa (2024) mengenai "*Collaborative Governance* dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru". Dalam penelitiannya, Adinda menemukan bahwa forum tatap muka merupakan mekanisme penting untuk membangun kesepahaman antaraktor, terutama dalam menyatukan persepsi dan merumuskan strategi bersama.

Partisipasi masyarakat dalam forum komunikasi juga berperan besar dalam memperkuat penerimaan sosial terhadap program RIAS. Dialog yang dilakukan secara informal maupun melalui kegiatan bersama membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan anak-anak binaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program di tingkat lokal. Sejalan dengan teori Ansell & Gash, dialog tatap muka dalam kasus ini berfungsi sebagai ruang negosiasi sosial yang menciptakan pemahaman bersama dan mempererat hubungan antaraktor.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan merupakan tahapan lanjutan setelah komunikasi terjalin dengan baik. Pembentukan kepercayaan (*trust building*) merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* karena menjadi dasar bagi keberlanjutan hubungan antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berhasil membangun kepercayaan melalui bukti nyata perubahan perilaku dan perkembangan anak binaan. Anak jalanan yang dulu di jalan sekarang bisa sekolah atau ikut kegiatan keterampilan di RIAS. Keberhasilan ini membuat masyarakat serta pihak swasta lebih yakin untuk terlibat dalam program. Sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash, kepercayaan tumbuh lewat interaksi yang konsisten dan hasil yang dapat diamati.

Selain itu, RIAS memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan melalui konsistensi penyelenggaraan kegiatan pembinaan setiap hari. Keajegan program, mulai dari belajar, konseling, hingga pelatihan keterampilan, memberikan rasa aman bagi anak-anak binaan dan meningkatkan keyakinan pihak luar. Pendekatan humanis dan empatik yang diterapkan pembimbing juga memperkuat hubungan emosional dengan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun di level kelembagaan, tetapi juga melalui hubungan interpersonal yang hangat dan berkesinambungan.

Transparansi menjadi faktor lain yang sangat menentukan dalam membangun kepercayaan, terutama bagi sektor swasta. Keterbukaan RIAS dalam menyampaikan proses program, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan dukungan membuat pihak swasta merasa dihargai dan dianggap sebagai mitra sejajar. Kondisi ini selaras dengan konsep mutual trust, di mana kepercayaan terbentuk karena kedua pihak saling menunjukkan integritas dan akuntabilitas. Transparansi ini juga mendorong sektor swasta untuk terus memperluas jenis dukungan yang diberikan.

Secara keseluruhan, pola pembangunan kepercayaan di Surabaya mencerminkan hubungan kolaboratif yang sehat dan saling menguatkan. Kepercayaan yang tumbuh tidak hanya bersifat satu arah, tetapi berkembang menjadi kepercayaan timbal balik antaraktor yang terlibat. Dinas Sosial, RIAS, masyarakat, dan sektor swasta saling percaya bahwa setiap pihak bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup anak jalanan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Khairul Amri (2023) mengenai "*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru", yang menunjukkan bahwa keberhasilan *trust building* sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran dan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

kejujuran antaraktor. Ketika setiap aktor memahami tanggung jawabnya dan menunjukkan integritas, maka jaringan kolaborasi menjadi lebih solid dan efisien.

c. Komitmen dalam Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen dalam proses merupakan unsur penting dalam keberhasilan kolaborasi penanganan anak jalanan di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan sebagai penggerak utama yang memastikan seluruh aktor memiliki komitmen jangka panjang terhadap program. Hal ini tampak dari penekanan mereka bahwa penanganan anak jalanan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan membutuhkan kesinambungan kegiatan. Pernyataan dari informan Dinas Sosial menguatkan bahwa kerja sama harus berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kegiatan saja. Temuan ini sejalan dengan Ansell dan Gash (2008), yang menegaskan bahwa komitmen awal menjadi faktor penentu stabilitas kolaborasi di tahap berikutnya.

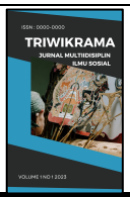
Komitmen yang tinggi juga ditunjukkan oleh pihak RIAS sebagai lembaga teknis yang menjalankan program pembinaan sehari-hari. Para pembimbing tetap melaksanakan kegiatan belajar, konseling, seni, olahraga, hingga pelatihan keterampilan meskipun menghadapi keterbatasan tenaga dan fasilitas. Konsistensi ini menunjukkan bahwa komitmen tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Pihak RIAS memandang bahwa pendampingan jangka panjang merupakan tanggung jawab moral mereka terhadap anak-anak binaan. Kondisi ini mencerminkan salah satu prinsip *collaborative governance*, yaitu kesediaan aktor untuk mempertahankan proses meskipun menghadapi berbagai tantangan.



Gambar 3. 1 Fasilitas di RIAS
Sumber: Dokumentasi Pribadi,2025

Sektor swasta turut memperkuat komitmen kolaborasi melalui keterlibatan aktif dalam mendukung pelatihan keterampilan bagi anak binaan. Motivasi mereka untuk terlibat muncul setelah melihat keseriusan pemerintah yang terlihat pada gambar 3.1 dari fasilitas RIAS yang lengkap, tertata, dan layak digunakan. Lingkungan fisik yang baik memberikan keyakinan bahwa program ini memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan hasil konkret. Dukungan seperti pelatihan *cooking class* dari Fave Hotel menjadi bentuk kontribusi nyata yang menunjukkan kesungguhan sektor swasta dalam memperkuat proses pembinaan. Hal ini

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



membuktikan bahwa kejelasan struktur dan fasilitas program dapat meningkatkan *willingness to engage* dari para mitra.

Komitmen masyarakat juga menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program pembinaan anak jalanan. Perubahan positif yang mereka lihat di RIAS, seperti tersedianya ruang belajar, alat musik, serta fasilitas keterampilan, membuat masyarakat merasa perlu terlibat dan memberikan dukungan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa dukungan moral, tetapi juga keterlibatan dalam menjaga lingkungan dan membantu aktivitas program. Penelitian Winda Anggraeni (2022) mengenai "*Collaborative* Governance dalam Pelaksanaan Program Penanganan Stunting (Studi Peran PKK di Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara)", menemukan bahwa keberlanjutan kolaborasi sosial sangat bergantung pada tingkat komitmen dan konsistensi para aktor dalam menjalankan perannya. Pola tersebut juga terlihat jelas dalam kasus penanganan anak jalanan di Kota Surabaya, di mana komitmen seluruh aktor baik dari pemerintah, RIAS, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor utama dalam mempertahankan kelangsungan program.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

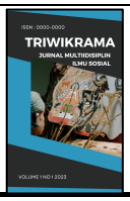
Pemahaman bersama (*shared understanding*) menjadi faktor penting yang memastikan seluruh aktor dalam kolaborasi memiliki arah dan tujuan yang sama dalam menjalankan program penanganan anak jalanan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Sosial, RIAS, sektor swasta, dan masyarakat berhasil menyamakan persepsi bahwa anak jalanan bukan sekadar penerima bantuan, tetapi subjek yang harus diberdayakan. Penyamaan persepsi tersebut tercipta melalui komunikasi yang intens, pertemuan tatap muka, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pembinaan. Kondisi ini sejalan dengan teori kolaborasi yang menekankan bahwa shared understanding merupakan prasyarat agar aktor dapat bekerja menuju tujuan yang sama.

Pemahaman bersama ini juga diperkuat oleh interaksi rutin yang memungkinkan setiap aktor melihat langsung proses dan tantangan pembinaan anak jalanan. RIAS memainkan peran kunci dalam menyampaikan gambaran faktual kondisi anak binaan sehingga pihak luar dapat menyesuaikan bentuk dukungannya. Melalui pendekatan ini, pemahaman tentang pemberdayaan menjadi nilai yang dibangun secara kolektif, bukan hanya konsep yang disampaikan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa *shared understanding* tumbuh dari pengalaman bersama, bukan sekadar informasi sepihak.

Sektor swasta seperti Fave Hotel berperan aktif dalam memperkuat pemahaman tersebut melalui kunjungan lapangan dan partisipasi dalam kegiatan. Setelah melihat langsung dinamika pembinaan di RIAS, pihak swasta memahami bahwa kontribusi mereka harus berkelanjutan, bukan bersifat seremonial. Dialog intensif dan bukti nyata perubahan anak-anak membuat mereka yakin bahwa kolaborasi ini adalah investasi sosial jangka panjang. Kondisi ini menegaskan bahwa shared understanding terbentuk ketika aktor merasakan sendiri manfaat dari kolaborasi.

Masyarakat sebagai aktor penting di tingkat lokal juga mengalami transformasi pemahaman. Pada awalnya, sebagian warga merasa khawatir terhadap keberadaan anak binaan, namun komunikasi terbuka dan hasil yang terlihat mengubah persepsi tersebut menjadi dukungan. Penelitian Rauzatul Rahmah (2023) mengenai "*Collaborative Governance* dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh", menjelaskan bahwa pemahaman bersama menjadi kunci

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



efektivitas kebijakan sosial berbasis kolaborasi, karena kesamaan pandangan memungkinkan aktor menyusun strategi bersama yang adaptif terhadap konteks lokal. Prinsip ini terlihat pula dalam praktik di Surabaya, di mana keselarasan nilai (*value alignment*) antaraktor memungkinkan semua pihak bekerja secara sinergis dan berfokus pada tujuan yang sama, yakni pemberdayaan anak jalanan.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara dari proses kolaborasi ini menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Hasil sementara yang muncul dari proses kolaborasi antara Dinas Sosial, RIAS, sektor swasta, dan masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu menghasilkan perubahan nyata dalam penanganan anak jalanan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 . Perubahan perilaku anak-anak yang semakin disiplin dan termotivasi mencerminkan keberhasilan pembinaan yang dilakukan secara konsisten Anak-anak mulai aktif di kelas musik, olahraga, dan beberapa sudah bisa membantu dalam kegiatan keterampilan seperti memasak dan melukis. Bahkan beberapa sudah ikut lomba dan tampil di acara. Hal ini sejalan dengan konsep *intermediate outcomes* yang dijelaskan Ansell & Gash (2008), yakni sebagai indikator awal keberhasilan kolaborasi yang dapat memperkuat komitmen antaraktor. Dengan adanya bukti perubahan nyata di lapangan, setiap pihak merasa bahwa kontribusi mereka memiliki dampak langsung bagi perkembangan anak-anak binaan.

Tabel 3.1 Hasil Sementara Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan

No.	Hasil
1.	Juara 1 Kejuaraan Tinju Tingkat Jawa Timur
2.	Juara 1 Kejurda Tinju Amatir Junior Youth Jawa Timur
3.	Memasak dan Berjualan di Kanri Cafe
4.	Kans Band Perform di Acara Hari Aksara Internasional yang di Adakan Oleh PKMB Permata Bangsa
5.	Kans Band Perform di Acara Gucci Dance Supershow feat Lion Club Surabaya Sejahtera

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Selain itu, program pembinaan yang dilakukan menunjukkan peningkatan partisipasi lintas sektor yang semakin solid. Pemerintah melalui Dinas Sosial, pengelola RIAS, sektor swasta, serta masyarakat membentuk pola kerja yang saling melengkapi. Pendekatan ini memungkinkan kebutuhan anak-anak diidentifikasi secara lebih komprehensif dan responsif. Keberhasilan kolaborasi ini menegaskan bahwa integrasi sosial, pendidikan, dan ekonomi merupakan kunci terciptanya pembinaan yang efektif bagi anak jalanan. Hal tersebut semakin memperkuat legitimasi program di mata masyarakat.

Keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan seperti pelatihan keterampilan juga menunjukkan berkembangnya kolaborasi ke arah yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Pelatihan *cooking class* yang difasilitasi pihak hotel bukan hanya memberikan keterampilan dasar, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

aspirasi masa depan bagi anak-anak. Interaksi langsung antara pihak swasta dengan anak binaan memperkuat pemahaman mereka bahwa kegiatan CSR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki dampak sosial yang besar. Hal ini membantu memperkuat hubungan kemitraan dan mendorong keberlanjutan kontribusi mereka dalam program. Dalam penelitian Bingqin Li, Jiwei Qian, Juan Xu, dan Yiran L (2022) mengenai "*Collaborative Governance in Emergencies: Community Food Supply in COVID-19 in Wuhan, China*", menunjukkan bahwa hasil sementara menjadi faktor penting dalam mempertahankan semangat kolaborasi antaraktor, karena bukti keberhasilan awal meningkatkan motivasi dan komitmen pihak-pihak yang terlibat.

Di sisi lain, dukungan masyarakat juga mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan perilaku anak-anak yang semakin positif menjadikan masyarakat lebih menerima bahkan bangga terhadap keberadaan RIAS di lingkungan mereka. Keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan memperlihatkan bahwa kolaborasi telah menciptakan efek sosial yang lebih luas, yaitu tumbuhnya solidaritas dan rasa memiliki dalam lingkungan. Dampak ini memperlihatkan bahwa *intermediate outcomes* tidak hanya muncul pada level individu, tetapi juga menciptakan perubahan kolektif di tingkat masyarakat.

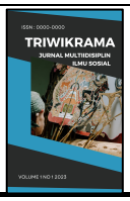
3. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Desain kelembagaan menjadi komponen penting dalam membangun tata kelola kolaboratif yang efektif. Desain kelembagaan dalam kolaborasi penanganan anak jalanan di Kota Surabaya menunjukkan adanya integrasi antara struktur formal dan mekanisme nonformal dalam tata kelola kolaboratif. Regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Wali Kota tentang penanganan anak jalanan menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi Dinas Sosial untuk menjalankan program. Namun, implementasinya tidak sepenuhnya bergantung pada aturan birokratis, melainkan dikombinasikan dengan komunikasi informal dan hubungan sosial. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip institutional design dalam *collaborative governance* yang menekankan keseimbangan antara aturan formal dan fleksibilitas. Struktur yang adaptif ini memudahkan berbagai aktor untuk terlibat tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

Peran Dinas Sosial sebagai lead institution memperlihatkan bagaimana koordinasi lintas aktor dibangun secara terarah namun tidak hierarkis. Pemerintah memegang kendali dalam menetapkan kebijakan, tetapi secara sadar memberikan ruang partisipasi kepada RIAS, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini mencerminkan model *shared responsibility* yang menempatkan setiap aktor sebagai kontributor aktif, bukan sekadar pelaksana. Praktik ini memperkuat posisi Dinas Sosial sebagai pengarah utama, namun tetap menjaga dinamika horizontal dalam kolaborasi. Dengan demikian, desain kelembagaan yang diterapkan mendorong terciptanya hubungan yang lebih setara dan inklusif.

Sebagai pelaksana teknis, RIAS memainkan peran penting dalam menjembatani kolaborasi antara pemerintah dan mitra eksternal. Fleksibilitas struktur internal yang memungkinkan pembentukan tim bidang pendidikan, keterampilan, dan pembinaan sosial memperlihatkan bagaimana inovasi dapat tumbuh dalam kerangka organisasi yang adaptif. RIAS juga mengatur komunikasi langsung dengan pihak swasta tanpa harus selalu melalui prosedur formal yang rumit. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang bersifat semi-formal dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi. Selain itu, hubungan berbasis kepercayaan memungkinkan kerja sama berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan anak jalanan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sektor swasta dan masyarakat juga memiliki peran strategis dalam desain kelembagaan yang inklusif dan partisipatif. Keterlibatan swasta melalui mekanisme CSR menunjukkan bahwa struktur kolaborasi cukup fleksibel untuk mengakomodasi kemampuan dan bidang masing-masing mitra. Sementara itu, masyarakat berperan melalui mekanisme sosial berupa gotong royong, partisipasi kegiatan, dan dukungan lingkungan. Bentuk kontribusi ini sejalan dengan penelitian Nada Balqis (2021) mengenai "*Collaborative Governance* dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh" yang menekankan bahwa desain kelembagaan yang jelas dan adaptif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi sosial. Struktur yang mampu menyeimbangkan peran formal dan fleksibilitas operasional terbukti mendukung kelancaran koordinasi, keterlibatan aktor, dan efektivitas program di lapangan.

4. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

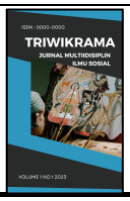
Kepemimpinan fasilitatif memegang peran kunci dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi penanganan anak jalanan di Kota Surabaya menunjukkan bagaimana pemimpin berperan sebagai penghubung antarpihak, bukan sebagai pengendali tunggal. Dinas Sosial menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif yang mendorong dialog dan menghindari pendekatan instruktif, sehingga aktor-aktor kolaborasi merasa dilibatkan secara setara. Hal ini sejalan dengan teori *collaborative governance* yang menekankan bahwa pemimpin harus menjaga proses tetap inklusif dan terbuka. Pendekatan empatik dan humanis juga menjadi kunci dalam membangun rasa saling percaya di antara pihak terkait. Dengan kepemimpinan seperti ini, kolaborasi dapat berjalan stabil meskipun menghadapi berbagai dinamika lapangan.

Di tingkat pelaksanaan teknis, Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) memperlihatkan kepemimpinan fasilitatif yang bersifat langsung dan dekat dengan kebutuhan anak binaan. Pemimpin di RIAS tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga terlibat dalam kegiatan harian, mendengarkan aspirasi, dan memfasilitasi koordinasi dengan mitra eksternal. Kepemimpinan yang tidak hierarkis ini menciptakan suasana kerja yang lebih kolaboratif dan mendorong inovasi dalam pembinaan anak jalanan. Kemampuan untuk mengelola perbedaan dan menyatukan berbagai pandangan juga memperkuat kualitas kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan operasional memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Dari perspektif sektor swasta, kepemimpinan fasilitatif yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial dan RIAS menjadi faktor pendorong keterlibatan mereka dalam program CSR. Komunikasi yang terbuka, fleksibel, dan responsif membuat pihak swasta merasa dihargai sebagai mitra setara, bukan sekadar pendukung. Kepemimpinan yang mampu menciptakan ruang bagi masukan dan inovasi terbukti meningkatkan kualitas kegiatan pelatihan bagi anak binaan. Keterlibatan langsung pemimpin dalam kegiatan lapangan juga memperkuat rasa kedekatan antaraktor. Dengan demikian, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berfungsi mengatur proses, tetapi juga menumbuhkan motivasi dan loyalitas mitra.

Di tingkat masyarakat, gaya kepemimpinan yang inklusif turut mendorong partisipasi warga dalam mendukung pembinaan anak jalanan. Tokoh masyarakat merasakan bahwa pemimpin RIAS memiliki pendekatan yang dekat, komunikatif, dan mampu membangun hubungan personal dengan warga. Hal ini menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga masyarakat bersedia membantu tanpa tekanan formal. Penelitian Aziz Masyhuri (2020) mengenai "*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Sehat (Studi

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



pada Pemerintah Kota Batu)" menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk memfasilitasi, bukan mendominasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan *collaborative governance* dalam penanganan anak jalanan di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi lintas sektor ini sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan integrasi peran antara Dinas Sosial, Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS), sektor swasta, dan masyarakat melalui empat komponen utama, yaitu kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Keempat komponen tersebut berhasil membangun kepercayaan, memperkuat komitmen, pemahaman bersama, serta capaian hasil sementara yang nyata bagi anak binaan. Namun, efektivitas kolaborasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat yang belum konsisten turut menjadi hambatan. Koordinasi dan mekanisme evaluasi yang belum sepenuhnya optimal juga memengaruhi kelancaran pelaksanaan program.

Selain itu, kolaborasi masih menghadapi ketergantungan terhadap kepemimpinan fasilitatif Dinas Sosial yang membuat kerja sama lintas aktor rentan terhadap dinamika birokrasi. Terdapat pula perbedaan persepsi antara pemerintah yang menekankan pembinaan berkelanjutan dan sebagian masyarakat yang menilai program lebih bersifat administratif atau penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan anak jalanan sangat bergantung pada penguatan komunikasi antaraktor. Transparansi mekanisme program dan sinkronisasi lintas lembaga juga perlu diperkuat. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan pendampingan yang berkelanjutan diperlukan agar kolaborasi dapat berjalan efektif dan mandiri secara kelembagaan.

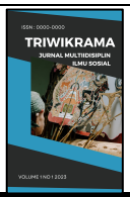
Saran

Berdasarkan darı kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Setiap rapat tatap muka antaraktor, baik yang melibatkan Dinas Sosial, RIAS, sektor swasta, maupun masyarakat, sebaiknya selalu dicatat secara rinci melalui notulensi dan dokumentasi kegiatan. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga menjadi dasar evaluasi, tindak lanjut program, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kolaborasi.
2. Pemerintah perlu menambah jumlah pendamping yang bertugas di RIAS minimal 2 orang untuk memenuhi kebutuhan pendampingan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis seperti manajemen kasus dan asesmen kebutuhan anak, sehingga pendamping mampu memberikan pendampingan yang lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan.
3. Perlu adanya penyusunan MoU atau perjanjian kerja resmi antara Dinas Sosial, RIAS, sektor swasta, dan masyarakat. Dokumen resmi ini berfungsi sebagai landasan hukum dan acuan operasional dalam pelaksanaan program kolaboratif. *Memorandum of Understanding* atau MoU menjelaskan peran, tanggung jawab, alokasi sumber daya, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi antaraktor. Dengan adanya perjanjian resmi, kolaborasi menjadi lebih terstruktur dan akuntabel, sehingga risiko konflik kepentingan dan ketidakjelasan tugas dapat diminimalkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Akira Tandika Paramitaningtyas. (2024). *Angka Anak Jalanan di Surabaya Meningkat Sejak 2022, Dinsos: Kolaborasi Seluruh Pihak Jadi Penanganan Terbaik*. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/angka-anak-jalanan-di-surabaya-meningkat-sejak-2022-dinsos-kolaborasi-seluruh-pihak-jadi-penanganan-terbaik/

Alfinda Adelia Dirli, Ujang Jamaludin, & Dinar Sugiana Fitrayadi. (2025). *Analisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang*. https://titikkata.com/kota-serang-masih-marak-anjal-dan-gepeng-dinyatakan

Amris. (2024). *7 Suku Masyarakat Indonesia Yang Merupakan Pendatang Dari Negara Lain*. https://radarmukomuko.disway.id/read/676117/7-suku-masyarakat-indonesia-yang-merupakan-pendatang-dari-negara-lain/30

Andhi Dwi Setyawan, A. H. (2024). *Kota Surabaya Dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Dunia oleh UNICEF*. https://surabaya.kompas.com/read/2024/09/27/090629278/kota-surabaya-dinobatkan-sebagai-kota-layak-anak-dunia-oleh-unicef

Andi Aysha Zalika Ardita Putri. (2022). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). *Antroposen : Journal of Social Studies and Humaniora*, *1*(1), 28–37. https://doi.org/10.33830/antroposen.v%vi%i.3265

Astuti, R. Sunu., Warsono, Hardi., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Press.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA0NCMx/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html

Dr. Isnaini Rodiyah, M. S., Hendra Sukmana, M. K., & Lailul Mursyidah, M. A. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*.

Faiz Asmi Permana, & Septi Nur Wijayanti. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, *3*(3), 219–234. https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323

Farhani, S., Sudiro, A. A., Khutub, M., & Zidni, M. F. (2024). Penguatan Pemahaman HAM Terhadap Anak Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, *3*(1), 184. https://doi.org/10.36722/psn.v3i1.2570

Febriana Rohmatin. (2025). *Anak Jalanan Di Surabaya : Antara Eksploitasi Dan Kemiskina, Mengambil Sedikit Cerita Dari Film The New Rules Of The Word By Jhon Pilger*. https://www.kompasiana.com/fby6253/67df3248c925c47d3020c3e2/dampak-globalisasi-di-surabaya-eksploitasi-tenaga-kerja-anak-jalanan

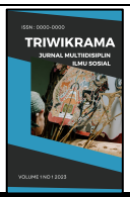
M. Sofi Al Umam. (2022). *Faktor Risiko Dan Faktor Protektif Pada Anak Jalanan*.

Mohammad Iqbal Syahriar, B. K. S. H. (2023). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Surabaya (Studi pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo)*.

Muchamad Gustavo Rivo. (2023). *New Public Governance Dalam Mengembangkan Organisasi Internasional Untuk Menyelesaikan Masalah Ekonomi Global Pasca Covid*. https://www.researchgate.net/publication/369588147_New_Public_Governance_Dalam_Mengembangkan_Organisasi_Internasional_Untuk_Menyelesaikan_Masalah_Ekonomi_Global_Pasca_Covid-19_Muchamad_Gustavo_Rivo_202010124

Muhammad. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Prespektif Hukum Keluarga Islam*.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Wali Kota Eri Paparkan Skema Pembinaan Remaja Dan Peran Orang Tua Di Surabaya*. https://surabaya.go.id/id/berita/23778/wali-kota-eri-paparkan-skema-pembinaan-remaja-dan-peran-orang-tua-di-surabaya

Rara Wa Ode, P. A. S. J. (2025). *Dinamika Sosial Ekonomi Anak Jalanan*.

Tio Ferdian Rahmana, R. (2024). Peran Cak Ning Surabaya Sebagai Ikon Promosi Wisata Kota Surabaya Tahun 2005-2020. In *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 15, Issue 2).

Veronika. (2022). *Pengertian Administrasi Umum: Unsur, Ciri, Fungsi, dan Contohnya*. https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-umum/?srsltid=AfmBOoplh6cr9RVhE8hQsbaGMgYkNZRhP28kpTX7GvZEZTnlM7mQf8S-